

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Caporaso, James & David P. Levine, 1992, *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Arifin, Ali, 2007, *Membaca Saham*, Andy, Yogyakarta.
- Calamari, John D. & Joseph M. Perillio, 1997, *Contract*, West Publishing Co., United States
- Friedmann, W., 1971, *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*, Steven and Son, London.
- Hernoko, Agus Yuda, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya M., 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya M., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Akumni, Bandung.
- H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- HS., H. Salim dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS., H. Salim dan Erlies Setiana Nurbani, 2013, *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S., Salim dkk, 2006, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- K. Muda, Ahmad Antoni, 2003, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gita Media Press, Jakarta.
- Marbun, B. N., 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Mediasoft Indonesia, Jakarta.

- Margono, Suyud, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mercuro, Nicholas & Steven G. Medema, 1997, *Economic and the Law: From Posner to Post-Modernism*, Princeton University Press, New Jersey.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Moin, Abdul, 2007, *Merger, Akuisis, dan Divestasi*, edisi kedua, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pangabeian, Henry P., 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2006, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Retnandari, Nunuk Dwi 2014, *Pengantar Ilmu Ekonomi dalam Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1994, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, cetakankedua, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta,
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, 2008, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sulistiyastuti, 2002, *Saham dan Obligasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sumadji dkk, 2006, *Kamus Ekonomi Lengkap*, WI Press, Jakarta.

Sunariyah, Ratih, 1997, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

Tulisan-tulisan Ilmiah dan Artikel-Artikel

Anonim, “Pemerintah Dinilai Tak Punya Komitmen Beli Divestasi Saham Freeport”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5625f36bed5b1/pemerintah-dinilai-tak-punya-komitmen-beli-saham-divestasi-freeport>, diakses tanggal 21 Oktober 2015.

Dermawan, Iwan, 2009, “Kewajiban Divestasi Saham Pada Penanam Modal Asing Bidang Pertambangan Umum (Studi Kasus Pada Perjanjian Kontrak Karya antara PT NNT dengan Pemerintah Indonesia)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hadisusilo, Gumilar, 2015, “Tinjauan Hukum Atas Pelaksanaan Kontrak Jasa Pelayaran Selaku Vendor Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Dalam Menunjang Eksplorasi *Offshore* (Studi Kontrak Kerjasama Antara PT. BRL Dengan PT. X)”, Tesis, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 25.

Kementrian energi dan Sumber Daya Alam, “Pemerintah Indonesia Gugat Newmont ke Arbitrase”, <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/1586-pemerintah-republik-indonesia-gugat-newmont-ke-arbitrase.html>, diakses Tanggal 4 Desember 2015.

Liputan 6, “Tambang Emas, Untuk Siapa?”, <http://news.liputan6.com/read/121631/tambang-emas-untuk-siapa>, diakses tanggal 4 Desember 2015.

Madura, Jeff, “Divestasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Divestasi>, diakses pada 12 November 2014.

Moriontoh, Rinaldi, 2006, “Kedudukan Kontrak Baku yang Dibuat BUMN dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan Keadaan serta Prospek Penerapannya di Masa Mendatang”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pria S., Lalu Wira, “Sinkronisasi Kebijakan Kerjasama antar Daerah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 27 Nomor 1 Februari 2015

Radendra Suastama, Ida Bagus, “Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan”, *Mimbar Hukum UGM*, Volume 24 Nomor 2 Juni 2012.

Radjagukguk, Erman, tanpa tahun, “Joint-Venture Policy and Relationship Between Majority and Minority Shareholder”.

Rahmadi Supancana, Ida Bagus, 2009, “Penyelesaian Sengketa-sengketa dalam Bidang Pertambangan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Saputra, Rendy, 2015, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sawabi, Ignatius, “Kasus Newmont Menjadi Acuan, Perusahaan Harus Taat”, <http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/02/08114781/kasus.newmont.menjadi.acuan.perusahaan.harus.taata>, diakses pada 13 Agustus 2015.

Subha Karma Resen, Made Gde, 2015, “Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance dan Good Corporate Governance (Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Entitas Bisnis”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Suryowati, Estu, “Soal Divestasi Freeport Tinggal Persoalan Kemauan Pemerintah”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/17/140104326/Soal.Divestasi.Freeport.Tinggal.Persoalan.Kemauan.Pemerintah>, diakses tanggal 21 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3552).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5282).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1122).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18 Februari 2013.

Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Siaran Pers Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 23/HUMAS DE SDM/2009 pada tanggal 1 April 2009 Perihal Putusan Arbitrase Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara.